



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Tinjauan tentang Pengadilan-pengadilan di Timor Leste Tahun
2004

Dili, Timor Leste
Desember 2004

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) didirikan pada awal 2001 di Dili, Timor Leste. Melalui pemantauan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan untuk mengambil bagian secara terus-menerus dalam evaluasi dan pengembangan sistem peradilan di Timor Leste. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.jsmp.minihub.org

JSMP sangat menghargai dukungan dari para donor untuk menulis laporan ini: *The Asia Foundation*

JSMP juga berterima kasih kepada donor yang lain:

USAid, AusAid, New Zealand Aid, International Commission of Jurists, Finnish Embassy.

*Judicial System Monitoring Programme
Rua Setubal, Kolmera, Dili – Timor Leste
Postal address: PO Box 275, Dili, Timor Leste
Tel/Fax: (670) 390 323 883
Mobile: +670 7246227
Email: info@jsmp.minihub.org*

1. RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
2. PENGADILAN PENGADILAN DISTRICT DAN ADMINISTRASINYA	7
2.1 Jumlah perkara yang terjadi di pengadilan Baucau,Suai, Oecusi selama 20047	
2.2 Tidak berfungsinya beberapa pengadilan distrik dan kegiatan pengadilan berpusat di Pengadilan Distrik Dili.....	7
2.3 Berfungsi kembali Pengadilan Pengadilan Distrik.....	8
2.4 Sistim distribusi baru di Pengadilan Distrik	9
2.5 Administrasi dan pengumuman informasi.....	11
2.6 Language Directive	12
3. KASUS KAUM PEREMPUAN DI PENGADILAN PENGADILAN DISTRICT	13
3.1 Aspek positif kasus kasus dalam 2004	13
3.2 Persoalan masih lanjut	14
4. PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT.....	15
5. PENGADILAN TINGGI.....	17
6. EVALUASI TERHADAP AKTOR AKTOR PERADILAN.....	19
6.1 Percobaan Hakim.....	20
6.2 Percobaan penuntut Umum dan Pembela Umum	20
7. PROGRAM PERLATIHAN BARU	21
8. BERAKHIRNYA UNMISSET	23
8.1 Proses Kejahatan Berat.....	23
8.2 Pengadilan Kejahatan Biasa	23
8.2.2 Pengadilan Tinggi.....	24

1. Ringkasan Eksekutif

Tahun 2004 merupakan tahun yang paling dinamik dalam sistem peradilan Timor Leste. Sementara, banyak masalah yang muncul dari hari ke hari, terlaksananya pengembangan struktur yang luas. Tahun ini menandai sebuah proses awal bagi pengangkatan actor-aktor pengadilan yang permanen, program pelatihan bagi actor yang lain dan kehadiran hakim internasional untuk pengadilan distrik, fungsi-fungsi pelatihan dan arahan. Perkembangan ini masih berlangsung dan enam bulan pertama pada tahun 2005 akan dipantau secara dekat berkenaan dengan hasil dari semua proses ini.

Selama awal 2004 sampai bulan November Pengadilan Distrik tidak berfungsi sebagaimana mestinya, disebabkan karena para actor pengadilan mengikuti beberapa pelatihan tentang hukum seperti pelatihan di Portugal dan Dili, dan tidak ada cukup dana untuk mengoperasikan kendaraan dan generator. Ketika pengadilan berfungsi lagi dalam bulan November, adalah perkembangan yang baik, khusus untuk pengadilan Suai yang belum pernah berfungsi di Suai. Masih terdapat juga persoalan antara lain sidang jarang digelar dan ketika hakim berada disana hanya untuk dua hari, satu atau dua kali per bulan. Tidak aktifnya hakim nasional di pengadilan distrik sedangkan ada 4 hakim internasional baru yang melakukan persidangan bertugas di wilayahnya. Diharapkan bahwa ketika ada actor-aktor pengadilan nasional tetap, tahun yang akan datang proses persidangan di distrik akan lebih efektif dan hakim internasional bisa melakukan peranan tambahan sebagai mentor untuk memperbaiki ketrampilan hakim nasional.

Bidang yang lain dalam Pengadilan distrik yang mengalami kemajuan di akhir tahun 2004 adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan kaum perempuan. Sejak didirikannya Women Justice Unit di JSMP pada bulan April 2004, mereka melihat bahwa pada tahun ini sudah ada kemajuan di sector peradilan formal mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan, dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu dimana tidak ada banyak putusan mengenai kasus terhadap perempuan. WJU melihat bahwa pihak aparat penegak hukum juga sudah mulai memahami masalah kekerasan terhadap perempuan. Selama satu tahun ini sudah ada 6 putusan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan. Keputusan untuk kasus ini lengkap dan memberi hukuman yang cukup berat untuk menghindari agar orang lain pun tidak akan melakukan hal yang demikian. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki prosedur penanganan yang dilakukan oleh polisi terhadap kasus kekerasan domestic. Hal ini harus disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku.

Administrasi peradilan secara umum merupakan sebuah komponen penting berfungsinya sebuah pengadilan secara efektif guna memastikan bahwa para pihak yang berkepentingan dalam persidangan dan masyarakat luas mendapatkan akses tentang informasi. Sistem informasi persidangan dan akses untuk informasi lainnya masih tahun ini merupakan persoalan di pengadilan distrik karena sistem perolehan informasi melalui dua ini memberikan kesan dualisme sistem administrasi, yaitu kasus dengan hakim internasional dan nasional di pengadilan distrik Dili dan ini bisa membingungkan masyarakat.

Akhir-akhir ini sejumlah petunjuk pelaksanaan fungsi pengadilan dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengadilan secara keseluruhan. JSMP mengamati bahwa sejumlah petunjuk dikeluarkan dalam bahasa Portugis yang mungkin kurang dimengerti secara baik oleh sejumlah aktor pengadilan. JSMP tidak mempersoalkan legalias bahasa yang dimaksud tetapi keadaan ini dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi peradilan secara efektif termasuk. Dengan kondisi saat ini sebaiknya aturan hukum apapun yang berpedampak pada pekerjaan peradilan diterjemahkan dalam bahasan yang dapat dimengerti para aktor dimana dapat membantu mereka melaksanakan fungsi pengadilan secara efektif.

Investigasi terhadap kejahatan berat berakhir pada bulan November 2004, dan persidangan serta kegiatan yang lain akan berakhir pada bulan May 2005. Pada tahun 2004, efisiensi dari Panel Khusus Kejahatan Berat meningkat dengan mengangkat sepertiga hakim Timor Leste dan pemakaian panel yang terpisah. Telah terlihat peningkatan pemahaman para jaksa pada saat tekanan waktu dan kecepatan yang mana SPSC menangani kasus. Meskipun diharapkan bahwa persidangan sekarang harus sudah diselesaikan sesuai dengan batas waktu bulan Mei, resolusi mengenai kasus-kasus kejahatan berat belum diputuskan. Masalah-masalah seputar apakah yang akan terjadi terhadap Panel Khusus belum terselesaikan.

Berkenaan dengan pengadilan Tinggi, pada tahun 2004 terlihat sebagai tahun yang terus melaukan operasi terhadap pengadilan dan penguatan akan posisinya yang penting sebagai sebuah pengadilan yang melakukan peninjauan terakhir dalam hirarki judicial di Timor Leste yang diikuti dengan periode 18 bulan, sampai bulan Juli 2003, yang mana pada saat itu berhenti berfungsi. Pada tahun 2004, telah terlihat ada perkembangan pada waktu mencapai putusan, khususnya dalam hal putusan interlocutory. Akan tetapi, banyak masalah-masalah yang mana masih mengundang keprihatinan JSMP, khususnya hubungan Pengadilan dan pengadilan Distrik dan (yang akan dirikan) Mahkamah Agung bersamaan dengan tidak adanya konsisten yang dapat ditemukan dalam praktek aktual dan prosedur banding.

Evaluasi bagi aktor peradilan menjadi actor tetap mulai tahun ini. Process dilaksanakan dengan berdasarkan kualifikasi individu seperti komitmen dan profesionalisme secara umum. Evlusi untuk para hakim mulai May 2004 dan untuk Jaksa dan Pengacara Umum pada tanggal 10 December 2004 and sampai 15 December 2004 tidak ada hasil evaluasi itu. Tidak akan ada lagi aktor-aktor pengadilan yang berstatus percobaan setelah dilaksanakannya evaluasi ini. Bagi aktor – aktor pengadilan yang tidak diangkat melalui evlusi ini akan mengikuti pelatihan, kalau mereka lulus ujian itu satu setengah tahun sebelum mereka diberikan status percobaan.¹

Berpisah process evaluasi tersebut, juga adalah pelatihan khusus kepada para semua aktor pengadilan dan para sarjana hukum. Tujuan pelatihan ini sebagai bagain preliminary untuk pelatihan lengkap satu setengah tahun. Dari program pelatihan lengkap itu, kalau orang lulus mereka mengikuti posisi percobaan di pengadilan. JSMP

¹ Tidak ada kepastian untuk seorang yang tidak lulus atau tidak boleh dievaluasi pada saat ini karena mungkin ada bertentangan di antara atauran atauran.

juga melihat bahwa pelatihan tersebut sangat penting untuk aktor pengadilan dan para sarjana hukum. Namun JSMP melihat bahwa banyak hambatan yang di hadapi oleh peserta karena peserta tersebut juga belum bisa memahami mengenai materi yang diberikan oleh pelatih dalam bahasa Portu.

Tahun 2005 menjanjikan akan sebuah tahun dinamik dalam system peradilan. Hasil dari pengangkatan aktor-aktor pengadilan permanent dan dimulainya pelatihan jangka panjang merupakan perkembangan yang disambut baik. Berakhirnya misi UNMISSET pada bulan Mei 2005 akan membawa perubahan yang signifikan terhadap yurisdiksi kejahatan berat, meskipun hal ini belum jelas bentuk perubahan apa yang akan terjadi. Perencanaan, khususnya berkaitan dengan pendanaan yang diperlukan oleh pemerintah Timor Leste untuk menjamin bahwa aktor-aktor internasional di pengadilan yang baru-baru ini masuk dalam system nasional, sebagai aktor, pelatih dan pengarah akan dapat melanjutkan posisi pekerjaan mereka di UNMISSET.

2. Pengadilan Pengadilan District dan Administrasinya

Setiap pengadilan Distrik mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kasus pidana dan perdata. Di Timor Leste ada 4 pengadilan Distrik yaitu Pengadilan distrik Dili, Pengadilan distrik Baucau, Pengadilan distrik Suai, dan Pengadilan distrik Oecusi. JSMP bermaksud untuk meninjau kembali dan menggambarkan keempat pengadilan itu dalam satu rangkain tentang apa yang terjadi selama setahun.

2.1 Jumlah perkara yang terjadi di pengadilan Baucau,Suai, Oecusi selama 2004

Di Pengadilan distrik Baucau selama setahun kasus pidana berjumlah 92 kasus. Dari sekian kasus tersebut termasuk 15 kasus yang baru didaftar dan sekitar 87 kasus merupakan kasus lama yang sudah dimulai dari tahun 2003. Kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum berjumlah 7 kasus dari 92 jumlah keseluruhan. Disamping itu persidangan terhadap peninjauan kembali penahanan 72 jam hanya sebanyak 17 perkara yang telah dilaksanakan. Jumlah Kasus perdata yang saat ini telah terdaftar sebanyak 14 kasus dengan jumlah dimana keseluruhannya adalah kasus-kasus yang telah dimulai dari tahun 2003 serta belum diputuskan.

Pada bulan Januari sampai dengan Desember 2004 sekitar 46 kasus pidana yang telah terdaftar di Pengadilan distrik Suai sebanyak 30 kasus yang telah diputuskan, sekitar 16 kasus yang belum diputuskan. Diantara 30 kasus yang berkekuatan hokum yang diputuskan oleh hakim nasional sebanyak 26 kasus sedangkan hakim internasional memutuskan 4 kasus.Terhadap kasus perdata berjumlah 12 kasus dimana masih menunggu proses putusan akhir.

Menurut panitra pengadilan distrik Oecusi total kasus pidana satu tahun rata-rata 27 kasus. Jumlah kasus meliputi 10 kasus dari tahun 2003 ditambah 17 kasus terbaru. Dari jumlah 27 kasus pidana apabila dirinci lagi 2 kasus sudah diputuskan dari total 18 kasus ditangani oleh hakim internasional. Dari Sisa 19 kasus lainnya belum ada putusan ditangani oleh hakim nasional².

2.2 Tidak berfungsinya beberapa pengadilan distrik dan kegiatan pengadilan berpusat di Pengadilan Distrik Dili

Perlu dijelaskan secara rinci bahwa tidak berfungsinya beberapa pengadilan distrik dalam melakukan ativitasnya di wilayah yurisdiksi masing-masing oleh karena sepertiga hakim dari setiap pengadilan distrik mengikuti training di Portugal sejak bulan Juli 2003 sampai pertengahan Juni 2004. Dalam periode ini terjadi juga perubahan hakim yakni jumlah hakim semakin kecil dibandingkan dengan sebelum para hakim ke Portugal seperti di Oecusse tidak ada hakim, walaupun dalam system rotasi agar hakim lain ke Oecusse untuk menangani kasus-kasus Oecussi, akan tetapi hal ini pun tidak terlaksana. Karena hanya ada dua hakim sehingga tidak semua kasus ditangani hingga selesai atau prosesnya tidak dapat dilanjutkan.

² Lihat laporan JSMP tentang Statistik, August 2004, www.jsmp.minihub.org

Selain itu, beberapa pengadilan Distrik tidak berfungsi secara maksimal akibat persoalan dana yang tidak mencukupi misalnya pengadilan distrik Baucau. Hasil wawancara JSMP dengan hakim dan jaksa pada bulan Mei 2004 di pengadilan distrik Baucau mengatakan bahwa tidak ada dana untuk membayar biaya telpon sehingga telepon tidak dapat digunakan dan mereka pun tidak dapat membeli bahan bakar solar kendaraan dan generator.³ Sehingga pengadilan distrik Baucau tidak dapat mengantar dokumen – dokumen perkara, mengenai rencana persidangan pun tidak dapat diberitahukan baik melalui telpon atau menemui langsung karena hakim tidak hadir di pengadilan karena tidak ada kendaraan⁴. Kasus – Kasus yang tertunda disebabkan karena kurangnya dana untuk memenuhi kebutuhan pengadilan distrik.

Faktor lain yang menghambat proses persidangan di Pengadilan distrik Baucau disebabkan kekurangan pengacara umum sehingga menyebabkan persidangan yang seyogyanya disidangkan dalam seluruh tahun tidak dapat dilaksanakan sampai pertengahan November tahun ini. Begitupun persidangan untuk pengadilan distrik Suai, dan Oecusi tidak dapat melakukan aktivitas persidangan (walaupun ada administrasi di Pengadilan Oecusse). Hal Ini bukan berarti mereka tidak melakukan rutinitas kegiatan persidangan, JSMP memperhatikan bahwa telah terjadi perpindahan kegiatan persidangan dari tiga pengadilan distrik ke pengadilan distrik Dili. Seluruh Kegiatan persidangan pengadilan distrik dalam jangka waktu tersebut dilaksanakan di pengadilan distrik Dili, termasuk kegiatan persidangan baik kasus pidana maupun kasus perdata serta kegiatan administrasi pengadilan dalam mengatur berkas perkara termasuk alokasi dana.

2.3 Berfungsi kembali Pengadilan Pengadilan Distrik

Pengadilan distrik Baucau berfungsi kembali pada awal November 2004 , dan pengadilan distrik Suai pada akhir November 2004, begitupun pengadilan distrik Oecusi kembali melakukan kegiatan persidangan pada awal Desember 2004. Hasil pemantauan JSMP selama di pengadilan distrik Baucau dan hasil wawancara dengan Panitra pengadilan distrik Suai, begitupun dengan pemantauan yang dilakukan oleh JSMP di pengadilan distrik Oecusi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala. Kendala-kendala yang dimaksud adalah tidak dilibatkannya para hakim, jaksa dan pembela umum nasional dalam menangani berbagai kasus, hal itu disebabkan adanya pelatihan di Centro Judiciario yang melibatkan semua actor pengadilan nasional. Sehingga para actor pengadilan nasional hanya menangani sebagian kasus sedangkan sebagiannya dilimpahkan kepada para hakim internasional untuk melakukan persidangan, hal ini terjadi pada pertengahan bulan September 2004. Berdasarkan pembagian tugas hakim internasional pada Pengadilan Distrik Baucau akan diserahkan kepada Hakim Elias Tomé dan Hakim Joana Vaz untuk menangani kasus pidana dan kasus perdata. Sedangkan kasus-kasus dari Pengadilan Distrik Oecussi dan Pengadilan Distrik Suai akan diserahkan kepada Hakim Sandra Silvestre. Kehadiran hakim internasional dibantu pula panitra internasional dan penerjemah untuk mempermudah pelaksanaan sidang.

³ melihat JSMP Siaran Pers 6 May 2004.

⁴ Lihat laporan JSMP tentang Keadilan di pengadilan distrik yang diterbitkan pada bulan Desember 2003 www.jsmp.minihub.org

Kendala lain yang juga nampak pada saat ini adalah ada empat hakim Internasional yang berada di Dili dan mereka juga melakukan tugas kerja di tiga pengadilan distrik yaitu Baucau, Suai, dan Oecusi. Hal ini menyebabkan kurang efektif dan lancarnya persidangan di setiap pengadilan Distrik artinya sidang yang digelar di pengadilan-pengadilan distrik hanya digelar kadang kadang saja, bukan setiap minggu dan hanya untuk beberapa hari. JSMP memantau persidangan terhadap kasus-kasus yang belum mendapat putusan akhir. Sedangkan khusus mengenai sidang preliminary hearing, peninjauan kembali, habeas corpus bagi tersangka yang berasal dari yurisdiksi pengadilan-pengadilan distrik kadang-kadang diadakan di pengadilan distrik Dili. Keadaan ini mengakibatkan Kasus-kasus yang berkaitan dengan penahanan 72 jam masih harus diproses dan dibawa ke pengadilan distrik Dili atau kadang kadang polisi tidak melakukan prosedur ini oleh karena aktor yang lain seperti Jaksa International tidak menetap di Baucau, sehingga mereka tidak dapat mengikuti kasus seluruhnya⁵. Persoalan lain berkaitan dengan kehadiran hakim internasional di Dili adalah kurangnya komunikasi dan interaksi dengan staff nasional di setiap pengadilan Distrik di luar Dili, karena hubungan antara hakim dan tenaga atau staff sangat penting untuk menjamin kelancaran proses di pengadilan.

2.4 Sistem distribusi baru di Pengadilan Distrik

Walaupun hakim nasional/ Timor Leste tidak sepenuhnya terlibat dalam persidangan yang digelar di semua Pengadilan Distrik karena beberapa alasan, dan Pengadilan Distrik Dili yang mempunyai sistem distribusi kasus yang paling kompleks, serta merupakan satu-satunya pengadilan di mana mereka akan tetap mengambil bagian secara aktif. Kasus-kasus tersebut akan didistribusikan sebagai berikut⁶:

- Kasus yang berada di bawah wewenang Hakim Investigasi nasional akan diserahkan kepada Hakim Emiliano.
- Kasus pidana yang sedang dalam proses untuk disidangkan dan kasus pidana baru di mana terdakwa masih berada di dalam penahanan pra-persidangan akan diserahkan kepada keempat hakim internasional yang baru.
- Kasus pidana yang menunggu disidangkan di mana terdakwa tidak berada dalam penahanan pra-persidangan dengan nomor terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, akan didistribusikan kembali kepada keempat hakim internasional yang baru.
- Kasus pidana yang menunggu disidangkan dimana terdakwa tidak berada dalam penahanan pra-persidangan dengan nomor terakhir 9 dan 0, akan didistribusikan kembali kepada Hakim Aderito, Angelino, Constancio, Carmelita, Deolindo, Jose Ximenes, Reinato, Sergio, Cirilio, Duarte, Edite, Francisco, Guilhermina, Ivonia, Joao, Jose Araujo, Nelson, Sebastiao dan hakim Rui.
- Kasus perdata yang menunggu untuk disidangkan dengan nomor terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 akan didistribusikan kembali kepada keempat hakim internasional yang baru.

⁵ Lihat Justice Up-date JSMP no 16/2004 misalnya para tersangka kasus kecelakaan bis di Wailili Baucau 28 October 2004 disidangkan di pengadilan distrik Dili

⁶ Melihat Directive 2004 and JSMP justice update 7/ 2004.

- Kasus perdata yang menunggu untuk disidangkan dengan nomor terakhir 9 dan 0 akan didistribusikan kembali kepada Hakim Aderito, Angelino, Constancio, Carmelita, Deolindo, Jose Ximenes, Reinato, Sergio, Cirilo, Duarte, Edite, Francisco, Guilhermina, Ivonia, Joao, Jose Araujo, Nelson, Sebastiao dan Rui.
- Kasus pidana dimana terdakwa tidak berada dalam penahanan pra-sidang dan kasus perdata yang didaftarkan setelah tanggal 20 September 2004 akan didistribusikan kepada keempat hakim internasional.
- Kasus yang sedang dalam proses kesimpulan terakhir atau pembacaan putusan akhir akan tetap ditangani oleh Hakim yang dulu ditunjuk untuk mengadilinya.

Distribusi kasus akan dilakukan menurut undian dan berdasarkan abjad. Nomor kasus akan dicatat pada sejumlah kertas dan kertas tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Hakim yang mengawasi proses distribusi akan secara acak mengambil kertas dan kasus yang ditulis pada kertas tersebut akan diserahkan kepada hakim berdasarkan abjad.

Namun adalah penting menjamin bahwa semua aktor pengadilan mampu memahami perubahan baru yang akan terjadi sebagai konsekuensi dari petunjuk tersebut. Petunjuk itu dikirim kepada hakim dan kantor pembela umum tetapi ketika petunjuk itu dikeluarkan, JSMP mengamati bahwa seringkali petunjuk tersebut tidak dikirim secara merata ke semua aktor pengadilan, misalnya dalam petunjuk itu JSMP mendapat informasi bahwa belum dikirim kepada panitera. Karena itu, pada tersebut, JSMP mengatakan bahwa apabila panitera tidak memahami sistem baru maka mereka tidak akan mampu menerapkannya dengan baik. Selain itu, JSMP juga prihatin dengan bahasa Portugis dalam petunjuk tersebut yang mungkin kurang dikuasai oleh mereka.

JSMP juga mengkritik petunjuk ini yang mengatur pendistribusian perkara yang sudah ditangani oleh hakim nasional untuk meneruskan proses penanganan yang sudah berlangsung. Sebab menurut aturan acara pidana yang berlaku, para hakim yang mengambil bagian dalam putusan akhir harus menghadiri setiap persidangan dalam suatu peradilan.⁷ Directivo Nomor 3/2004 meminta hakim internasional untuk menerima pelimpahan semua kasus kecuali kasus yang hampir diputuskan. JSMP berpendapat bahwa pengecualian itu harus diperluas termasuk sidang terhadap bukti-bukti yang penting yang telah dilakukan sebelumnya.

2.4.1 Sistim distribusi selama liburan

Menjelang liburan natal dan akhir tahun sebuah directiva 4/ 2004 dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Directiva tersebut dikeluarkan sehubungan dengan akan berliburnya para hakim internasional selama satu bulan yaitu pertengahan bulan ini hingga pertengahan januari tahun depan. Selama ketidakhadiran para hakim internasional pelaksanaan persidangan di pengadilan posisi mereka akan digantikan oleh hakim nasional sebagaimana disebut dalam directiva tersebut. Pergantian posisi itu terjadi di pengadilan-pengadilan distrik, pengadilan spesial panel dan pengadilan tinggi, tetapi

⁷ Melihat pasal 30.1 Regulasi UNTAET 30/ 2000 diamenden 25/ 2001

untuk dua pengadilan yang disebutkan terakhir ini tidak akan ada persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang diperoleh oleh JSMP.

JSMP tidak mengerti isi direktiva tentang penugasan hakim itu apakah termasuk perkara yang sedang ditangani oleh hakim internasional. Apabila penugasan itu hanya berlaku untuk sidang 72 jam mungkin tidak ada persoalan tetapi jika termasuk sidang atas perkara pokok maka kemungkinan akan berhadapan dengan larangan pelimpahan perkara selama persidangan berdasarkan regulasi tentang acara pidana UNTAET yang berlaku. Kondisi ini menjadi semakin tidak jelas dengan tidak dijelaskan dalam direktiva tentang bagaimana proses pergantian hakim dilakukan. Sebab jika direktiva itu termasuk sidang perkara pokok maka persoalannya juga menyangkut bagaimana proses penyerahan perkara dilakukan oleh hakim internasional kepada para hakim yang bertugas selama masa liburan. JSMP memperoleh informasi dari seorang aktor pengadilan yang mengatakab bahwa pendistribusian tersebut tidak mencakup kasus-kasus yang sedang berjalan yang ditangani hakim internasional. Menurut actor pengadilan itu, persidangan untuk hakim yang ditugaskan selama liburan termasuk mungkin termasuk persidangan perkara pokok yang mungkin dijadwalkan hakim nasional selama periode yang dimaksud direktiva itu.

JSMP belum memperoleh informasi tentang kemungkinan ada agenda sidang perkara pokok dari hakim internasional selama liburan hakim, tetapi JSMP hanya memperoleh informasi bahwa ada sebuah sidang kasus perdata yang ditangani oleh hakim internasional yang ditunda hingga bulan januari.

JSMP menyambut baik kehadiran hakim internasional sehubungan dengan kompleksitas penyelesaian perkara di pengadilan saat ini sehingga persoalan pengadilan terbantu dengan kehadiran hakim internasional. Disisi lain, JSMP mengamati bahwa perencanaan dan pengaturan kerja hakim internasional dalam sistim judicial Timor Leste sepertinya tidak terencana dengan baik. Misalnya dalam beberapa perkara/persidangan sering terjadi pergantian jaksa maupun pengacara karena alasan pelatihan. Dalam peristiwa seperti ini dimana pengacara dan jaksa sedang mengikuti pelatihan sering kali hakim harus menunda sidang untuk mencari jaksa atau menunda sidang untuk mencari aktor pengganti untuk melanjutkan persidangan. JSMP mendukung sepenuhnya pelatihan yang kini diikuti para aktor pengadilan tetapi JSMP berpendapat bahwa perencanaan untuk pelatihan dan jadwal persidangan para aktor pengadilan yang sering kali bertabrakan menyebabkan beberapa kasus yang disidangkan menjadi kurang efektif.

2.5 Administrasi dan pengumuman informasi

Hak untuk mengakses informasi tentang persidangan di pengadilan pernah ditulis dalam laporan JSMP yang berjudul keadilan di pengadilan distrik tahun 2003.⁸ Hak itu dijamin dalam hukum yang berlaku dan merupakan bagian dari persoalan penting persidangan yang terbuka bagi umum. JSMP mengamati sejumlah persoalan dan merekomendasikan untuk melakukan perbaikan dalam beberapa aspek. Selama satu tahun terakhir ini JSMP mengamati bahwa persoalan administrasi pengadilan terutama

⁸ Melihat Laporan JSMP “ keadilan di Distrik” Desember 2003.

perbaikan akses untuk memperoleh informasi belum mencapai perubahan yang berarti. Contoh sederhana tentang papan pengumuman sejauh pengamatan JSMP belum dimanfaatkan secara efektif. Sementara itu, untuk memperoleh informasi tentang persidangan harus mengecek agenda sidang dalam ruang panitera yang sering kali mengganggu suasana dan ketenangan kerja panitera di bagian ini. JSMP dalam jauh sebelumnya telah merekomendasi perbaikan tentang perbaikan akses informasi kepada publik tetapi sejauh ini tidak ada perubahan perihal jaminan akan informasi persidangan.

Dalam perkembangan kemudian, sumber informasi tentang persidangan justru membingungkan karena sumber informasi persidangan untuk kasus yang ditangani hakim internasional justru harus diperoleh dari panitera yang berbeda (panitera internasional) yang bukan panitera yang sehari-hari bekerja pada pengadilan distrik Dili. JSMP juga mengamati bahwa para panitera internasional tidak bekerja secara tetap di Pengadilan Distrik. Meskipun terlihat panitera yang tampaknya bekerja di Pengadilan Distrik tetapi tidak dalam ruangan yang sama dengan ruang panitera lokal. JSMP juga mendapat informasi bahwa para hakim dan panitera internasional itu berkantor di pengadilan tinggi hanya saja mereka harus (biasanya) menghabiskan sebagian besar waktu pekerjaannya di pengadilan distrik.

JSMP juga mengecek agenda sidang pada bagian panitera tetapi rupanya informasi sidang untuk perkara yang ditangani hakim internasional tidak terdapat pada agenda yang sama. Petugas di bagian kesekretariatan memberitahukan kepada JSMP bahwa mereka hanya melakukan notifikasi kalau dikirim/diminta oleh penitera/hakim internasional.

JSMP dapat memahami keperluan hakim internasional untuk kebutuhan yang spesifik dengan panitera tersendiri, tetapi sejauh pengamatan JSMP kondisi ini terkesan seperti adanya dua sistem administrasi di pengadilan Distrik Dili. Informasi tentang persidangan untuk hakim nasional dapat diperoleh di bagian panitera tetapi persidangan untuk kasus hakim internasional hanya bisa diperoleh melalui panitera internasional yang tidak memiliki kantor tetap di pengadilan distrik.

Hal yang sama terlihat dalam persidangan bahwa pada awalnya para hanya panitera internasional yang mendampingi hakim dalam proses persidangan. Meskipun belakangan JSMP mengamati bahwa panitera lokal juga mulai dipanggil untuk beberapa persidangan dan ini merupakan perkembangan yang baik untuk proses belajar dan beradaptasi tetapi JSMP berpendapat bahwa harus dipastikan bahwa para panitera local juga dapat mengetahui informasi persidangan sebelum mengikuti persidangan dan penting dijamin bahwa sistem informasi persidangan disediakan melalui satu jalur/sumber

2.6 Language Directive

Pada bulan februari 2004 Majelis Tinggi Kehakiman mengeluarkan sebuah direktif tentang penggunaan bahasa resmi di pengadilan. Direktif itu memberikan kesempatan selama kurang lebih tujuh bulan untuk mengimplementasi bahasa resmi –tetun dan portugués- dalam semua dokumen di pengadilan. Implisit direktif itu melarang

penggunaan bahasa Indonesia di pengadilan. Mengingat dampak implementasinya dan tanggapan para aktor pengadilan dalam kondisi ketika direktif itu diberlakukan, JSMP telah membuat sebuah laporan khusus untuk membahas dampak implementasi direktif tersebut. Secara prinsip JSMP tidak mempersoalkan legalitas bahasa resmi, tetapi JSMP berpendapat bahwa dampak implementasinya di pengadilan mengingat kebanyakan aktor pengadilan belum terbiasa menggunakan kedua bahasa itu di pengadilan, terlebih dalam penulisan dokumen. Saat ini JSMP mengamati bahwa terjadi perubahan penggunaan bahasa di pengadilan dari bahasa kerja menjadi bahasa resmi. Apabila dalam persidangan dipimpin oleh hakim internasional biasanya digunakan dua bahasa (tetun dan Portugis) terkecuali kalau semua aktor persidangan adalah orang Timor Leste. Persidangan oleh hakim internasional saat ini disediakan penerjemah biasanya dalam bahasa Portugis ke tetun dan khususnya persidang yang dipimpin oleh hakim internasional. Meskipun demikian, saat ini sepertinya tidak ada penerjemah khusus di pengadilan distrik yang bekerja secara permanen di pengadilan untuk membantu hakim-hakim nasional, baik di persidangan maupun di luar persidangan (penerjemahan dokumen dan urusan administrasi lain).

3. Kasus Kaum Perempuan di Pengadilan Pengadilan District

Pada awal tahun ini laporan JSMP yang berjudul “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” berdasarkan pemantauan pengadilan yang dilakukan selama dua bulan terakhir tahun 2003 atas kasus yang menyangkut Kaum Perempuan sebagai korban di Pengadilan District Dili.

JSMP melihat dalam kasus – kasus di Pengadilan District selama masa pemantauan 2 bulan September di Dili District bahwa:

- Kasus yang menyangkut perempuan merupakan mayoritas (55 persen) dari semua persidangan pidana yang dijadwalkan selama masa pemantauan.
- 78% kasus yang menyangkut perempuan adalah kasus kekerasan seksual;
- Tidak ada kasus yang berlanjut sampai mendapat putusan selama dalam pemantauan.

Sejak didirikan (Women Justice Unit) di JSMP pada bulan April 2004, telah memantau kasus yang berhubungan dengan perempuan dan sekitar enam kasus yang telah mendapat putusan dari pengadilan, putusan ini mengenai kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual. Women Justice Unit telah memantau kasus lebih dari 30 kasus. JSMP melihat bahwa sudah ada kemajuan di sektor pengadilan mengenai kasus terhadap perempuan sebagai korban kekerasan.

3.1 Aspek positif kasus kasus dalam 2004

- JSMP memantau ada lebih banyak kasus korban perempuan yang diselesaikan oleh pengadilan pengadilan distrik tahun ini.

- Kebanyakan keputusan lengkap dan hukuman semua 5- 10 tahun mestinya mempunyai dampak preventif dan mengirimkan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa kekerasan domestik merupakan kejahatan, dan bahwa hukuman penjara akan dijatuhkan dalam kasus kekerasan domestik yang berat. JSMP berharap bahwa persidangan-persidangan lain yang menyangkut kasus kekerasan domestik akan diputuskan dalam waktu efisien⁹.

3.2 Persoalan masih lanjut

- WJU melihat bahwa banyak kasus yang terjadi terhadap perempuan tetapi proses penyelesaian begitu lama terhadap hukum formal.
- Di seluruh Timor Leste dan pada khususnya di distrik-distrik, tidak ada alat komunikasi seringkali tidak ada telpon atau transportasi. Seringkali jauh dari kantor polisi yang terdekat.
- Kaum perempuan seringkali merasa malu untuk memberitahu polisi tentang kekerasan yang terjadi, pada khususnya apabila kekerasan seksual telah terjadi, mereka tidak mau memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi terhadap dirinya.
- Kaum perempuan juga khawatir bahwa apabila mereka memberitahu polisi tentang kekerasan tersebut maka informasi ini akan diketahui oleh banyak orang.
- Tidak adanya istilah yang tepat untuk menyebutkan organ tubuh ketika terjadi kasus kekerasan seksual.
- Kurangnya kehadiran dokter sebagai saksi ahli untuk menjawab laporan mereka di pengadilan.

3.3 Penanganan dan kasus kaum perempuan

Dari penelitian oleh JSMP terakhir tahun 2004 di semua distrik, bahwa oknum polisi ada yang tidak mengerti mengerti bahwa kasus kekerasan domestik adalah termasuk kasus yang sangat serius. Semua petugas PNTL yang diwawancarai mengakui bahwa kekerasan domestik adalah kejahatan tetapi mereka akan memprosesnya kalau korban mengalami luka berat maka proses ini dapat menempuh peradilan formal. Apabila ada kasus yang dipertimbangkan oleh mereka bahwa kasus tersebut sedikit ringan maka pihak PNTL menyerahkan kembali kasus tersebut untuk diselesaikan secara adapt atau secara. Walaupun pihak PNTL telah menangkap tersangka, yang melakukan kejahatan terhadap istrinya atau orang yang masih ada hubungan dengan pelaku maka polisi seringkali memasukan pelaku ke dalam sel selama 72 jam akan tetapi pihak korban datang dan menarik kembali kasus mereka karena alasan bahwa ketergantungan ekonomi pada

⁹ Melihat JSMP Justice Update 13/ 2004.

suami. Kebiasaan polisi juga sering membuat surat pernyataan agar pelaku pada masa yang akan datang tidak mengulangi lagi perbuatan terhadap istrinya. Namun, semua petugas polisi diwawancarai mengatakan bahwa mereka tahu kekerasan seksual adalah suatu kejahatan, dan kebanyakan mereka mengatakan bahwa kasus seperti ini selalu diselesaikan melalui proses persidangan yang formal.

4. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat

Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, bagaian pengadilan distrik, melanjutkan tahun ini dan keputusan lebih banyak dari pada tahun yang lalu. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat ('PKKB') dibentuk berdasarkan *Regulasi UNTAET 2000/15*, Bagian 1 untuk melaksanakan yurisdiksi atas pembunuhan dan kekerasan seksual sebagai 'kejahatan berat' yang dilakukan antara tanggal 1 Januari 1999 sampai 25 Oktober 1999, serta genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang tidak mempunyai batasan waktu.

Kantor Kejahatan Berat berhenti melakukan investigasi atas kejahatan berat pada bulan November 2004, sebagaimana diatur dalam *Resolusi Dewan Keamanan 1543/2004*. Dari jumlah 1500 pembunuhan yang dilaporkan, kira-kira 800 pembunuhan diinvestigasi dan kira-kira 400 kasus pembunuhan ditutup karena kekurangan bukti.¹⁰ Permohonan untuk 237 surat perintah penangkapan diajukan kepada Panel-Panel Khusus, dan 203 permohonan dikabulkan.¹¹ 49 surat perintah penangkapan masih sedang diproses.¹²

Ada spekulasi bahwa surat dakwaan tidak akan dilimpahkan setelah bulan November 2004 sebagai akibat dari Resolusi Dewan Keamanan 1543/2004. Namun, 4 surat dakwaan baru dilimpahkan pada tanggal 3 dan 6 Desember 2004. Diduga bahwa Kantor Kejahatan Berat dapat tetap melimpahkan surat dakwaan sampai tanggal 20 Mei 2005, di mana pada tanggal tersebut semua persidangan dan kegiatan lain harus diselesaikan.¹³

Pada saat ini 90 surat dakwaan telah dilimpahkan kepada SPSC, yang mendakwa 377 orang.¹⁴ 48 terdakwa adalah warga negara Indonesia dan sisa 329 terdakwa adalah warga negara Timor Leste atau tidak diketahui atau tidak jelas kewarganegaraannya.¹⁵ Hanya 81 terdakwa berada di Timor Leste, dan diduga bahwa 290 terdakwa berada di luar Timor Leste.¹⁶ Jumlah surat dakwaan (dan terdakwa) dari masing-masing distrik adalah sebagai berikut: 18 surat dakwaan dari Bobonaro (yang mendakwa 122 terdakwa), 14 surat dakwaan dari Dili (yang mendakwa 62 terdakwa), 13 surat dakwaan dari Oecussi (yang mendakwa 43 terdakwa), 8 surat dakwaan dari Ermera (yang mendakwa 14 terdakwa), 6 surat dakwaan dari Liquiça (yang mendakwa 26 terdakwa), 5 surat dakwaan dari Lautem (yang mendakwa 23 terdakwa), 5 surat dakwaan dari Suai (yang mendakwa 8 terdakwa), 4 surat dakwaan dari Aileu (yang mendakwa 6 terdakwa), 4 surat dakwaan dari

¹⁰ Statistik Kantor Kejahatan Berat, yang berlaku pada tanggal 8/12/2004.

¹¹ Statistik Kantor Kejahatan Berat, yang berlaku pada tanggal 8/12/2004.

¹² Statistik Kantor Kejahatan Berat, yang berlaku pada tanggal 8/12/2004.

¹³ *Resolusi Dewan Keamanan 1543/2004*.

¹⁴ Statistik Kantor Kejahatan Berat, yang berlaku pada tanggal 8/12/2004.

¹⁵ Statistik Kantor Kejahatan Berat, yang berlaku pada tanggal 8/12/2004.

¹⁶ Statistik Kantor Kejahatan Berat, yang berlaku pada tanggal 8/12/2004.

Manatuto (yang mendakwa 5 terdakwa), 3 surat dakwaan dari Same (yang mendakwa 6 terdakwa), 2 surat dakwaan dari Ainaro (yang mendakwa 23 terdakwa), 2 surat dakwaan dari Covalima (yang mendakwa 34 terdakwa), 1 surat dakwaan dari Viqueque (yang mendakwa 7 terdakwa), dan 1 surat dakwaan Nasional (yang mendakwa 7 terdakwa).¹⁷

SPSC mulai mengadili kasus pada tahun 2001. Sejak waktu itu, 74 terdakwa telah dihukum dan 2 terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan.¹⁸ Persidangan untuk 13 terdakwa masih diproses di hadapan SPSC.¹⁹

Setiap Panel Kejahatan Berat harus terdiri dari dua hakim internasional dan satu hakim Timor Leste.²⁰ Dengan menunjuk hakim Timor Leste yang ketiga untuk bekerja di SPSC, yaitu Hakim dos Santos, yang mulai mengadili kasus pada bulan November 2004, maka dapat meningkatkan efisiensinya SPSC, karena tiga panel dapat beroperasi sekarang. Penerapan suatu sistem dimana satu panel mengadili kasus pada pagi hari dengan panel lain pada sore hari (karena hakim-hakim nasional sedang menghadiri latihan) juga meningkatkan efisiensi.

Dengan semakin dekatnya 20 Mei 2005, di mana SPSC harus berhenti mengadili persidangan yang ada dihadapannya, dapat dilihat bahwa para hakim semakin sadar atas tekanan waktu dan SPSC mengadili kasus-kasus secara lebih cepat. Diamati bahwa dalam sekurang-kurangnya tiga kasus yang digelar baru-baru ini; yaitu Anton Lelan Sufa dan orang-orang lain, Mateus Lao, Domingos Amati dan orang-orang lain, rupanya bahwa panel-panel mengambil keputusan untuk mendengar saksi dan menunda sidang dengan mengacu secara langsung atau tidak langsung pada kenyataan bahwa kasus harus diselesaikan secepatnya²¹. Memang positif kalau SPSC ingin mengurangi penundaan, meningkatkan efisiensi manajemen kasus dan menyelesaikan kasus sebelum bulan Mei 2005, namun penting agar keperluan untuk menyelesaikan kasus secepatnya dipertimbangkan bersama dengan hak terdakwa atas persidangan yang adil sebagaimana dijamin di bawah *Regulasi UNTAET 2000/15*, Bagian 2.

Rupanya bahwa semua kasus dapat diselesaikan sebelum bulan Mei 2005, asal Panel-Panel dapat tetap mengeluarkan keputusan secepat ini dalam kasus-kasus lain, dan asal tidak dilimpahkan surat dakwaan baru dalam jumlah yang besar dimana terdakwa dapat menghadiri sidang.

Sebagaimana dibahas dalam bagian mengenai berakhirnya UNMISSET, pemerintah Timor Leste belum mengambil keputusan tentang masa depan kejahatan berat setelah bulan Mei

¹⁷ Kantor Kejahatan Berat, 'Distribusi kasus Kantor Kejahatan Berat, yang mana surat dakwaan dilimpahkan, untuk masing-masing distrik', belaku pada tanggal 8/12/2004. Jumlah kasus ini tidak persis sama dengan jumlah surat dakwaan, karena sebagian kasus disatukan dan/atau dipisahkan, tetapi dalam semua kasus ini surat dakwaan dilimpahkan kepada Pengadilan. Juga, seorang terdakwa dapat didakwakan dalam lebih dari satu kasus..

¹⁸ Statistik Kantor Kejahatan Berat, yang berlaku pada tanggal 8/12/2004.

¹⁹ Statistik Kantor Kejahatan Berat, yang berlaku pada tanggal 8/12/2004.

²⁰ *Regulasi UNTAET 2000/15*, Bagian 22.1.

²¹ Lihat JSMP Justice update No. 12/2004, Tujuh orang dihukum bersalah atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, 11 November 2004.

2005, atau untuk menasionalisasikan proses ini atau para pengambil keputusan belum mempertimbangkan sepenuhnya mekanisme internasional lainnya.

Pengadilan Tinggi pernah menjatuhkan putusan-putusan yang menyatakan bahwa bagian-bagian dari legislasi UNTAET yang diterapkan oleh Panel Khusus tidak sesuai dengan Konsistensi karena melanggar prinsip bahwa tidak diperkenankan hukum yang berlaku surut, namun ternyata bahwa persoalan ini sudah diselesaikan. Dalam kasus banding yang digelar baru-baru ini atas nama Paulino de Jesus, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan berdasarkan ketentuan-ketentuan Regulasi UNTAET yang dulu dianggapnya tidak sesuai dengan Konstitusi.²²

5. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi mulai berfungsi pada bulan Juli 2000, namun selama 18 bulan Pengadilan Tinggi tidak dapat beroperasi karena tidak ada hakim-hakim yang memiliki kualifikasi yang tepat. Dengan mengingat selang waktu tersebut, maka kenyataan bahwa Pengadilan Tinggi telah beroperasi kembali pada bulan Juli 2003 adalah perkembangan yang positif. Lagipula Pengadilan Tinggi tetap berfungsi secara konsisten selama tahun 2004. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi telah mengkonsolidasikan posisi pentingnya dalam sistem peradilan sebagai pengadilan yang dapat melakukan peninjauan terakhir dan sebagai pengadilan tertinggi di Timor Leste.

Di antara pada tanggal 1 January- 1 June 2004 Pengadilan Tinggi telah mengadili 33 cases²³. Sebagian besar banding adalah banding sela, yang menurut undang-undang harus diadili secepatnya. Hampir semua kasus banding tersebut berasal dari Pengadilan Distrik Dili dan hanya ada satu yurisdiksi lain yang menimbulkan banding dalam jumlah yang signifikan, yaitu Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Kebanyakan kasus pidana dengan hanya beberapa kasus sipil banding.

Tanpa mengurangi pentingnya pembentukan dan pembukaan kembali pengadilan ini sebagai pengadilan permanen dalam sistem peradilan Timor Leste, ternyata bahwa penelitian dan pemantauan yang dilakukan oleh JSMP mengungkapkan bahwa kemajuan Pengadilan tersebut tetap dihalangi oleh kekurangan-kekeruan pada sistem peradilan. Rupanya bahwa hubungan antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan-Pengadilan Distrik pada khususnya menghadapi kesulitan karena tidak ada komunikasi yang baik. Misalnya, dalam kasus *Diamantino* (no 45/2004) terdakwa naik banding atas keputusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Distrik Dili untuk memperpanjang masa penahanan pra-sidangnya. Banding tersebut diterima dan terdakwa kemudian dibebaskan dari penahanan, namun Pengadilan Distrik tidak diberitahu tentang keputusan tersebut dan staf dari Pengadilan Distrik baru mengetahui situasi ini beberapa minggu kemudian pada

²² Melihat laporan dari JSMP konferensi tentang “Keadilan untuk Timor Leste, 23-24 Sepembre, 2004”.

²³ Diiskusi yang lebih terperinci tentang statistik yang berkaitan dengan operasinya Pengadilan Tinggi dapat dilihat pada Laporan JSMP - *Proses dan Pengelolaan Kasus: Analisa Statistik untuk periode Januari 2003 hingga Juni 2004*, Agustus 2004)

saat terdakwa mendatangi kepaniteraan²⁴. Ada kasus-kasus lain yang juga memprihatinkan, di mana Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa perintah deportasi dari Pengadilan yang lebih rendah tidak sah, namun orang-orang yang tersangkut tetap dideportasi tanpa melihat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi mempunyai hubungan yang tidak jelas dengan Mahkamah Agung dan hal ini menimbulkan cukup banyak kebingungan di sistem hukum. Walaupun diatur dalam Konstitusi, Mahkamah Agung belum dibentuk. Ketentuan-ketentuan sementara yang diadopsi melalui *Konstitusi* dan *Undang-Undang Kehakiman* mengizinkan Pengadilan Tinggi untuk melaksanakan yurisdiksi Mahkamah Agung²⁵. Oleh karena itu, secara teoritis dapat diperdebatkan bahwa Pengadilan Tinggi dapat melaksanakan yurisdiksi Mahkamah Agung untuk mengadili banding atas keputusannya sendiri. Pengadilan Tinggi pada saat ini hanya terdiri dari tiga hakim (Hakim Claudio Ximenes, Hakim José Maria Calvário Antunes dan Hakim Jacinta Correia da Costa). Lagipula, kemungkinan kecil bahwa Mahkamah Agung akan dibentuk dalam beberapa tahun yang akan datang karena tidak ada hakim asal Timor Leste²⁶ yang mempunyai kualifikasi memadai untuk memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai hakim di Mahkamah Agung²⁷. Hal ini berarti bahwa semua banding atas keputusan dari Pengadilan Tinggi akan diadili oleh Hakim-Hakim yang mengeluarkan keputusan tersebut. Yang jelas, imparialitas kehakiman akan dibahayakan dalam keadaan seperti ini dan tidak merupakan opsi yang layak apabila banding diadili dengan cara semacam ini. Walaupun demikian, secara teoritis juga diperdebatkan bahwa naik banding dan hal ini sudah dilaksanakan dalam sekurang-kurangnya dua situasi yang diketahui oleh JSMP²⁸. Pengadilan Tinggi tidak mengadili banding pertama dan belum memberi jawaban atas banding kedua yang diajukan baru-baru ini. Situasi ini menciptakan cukup banyak ketidakpastian dan masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin, bila perlu melalui undang-undang yang akan mengklarifikasikan apakah, dan bagaimana Pengadilan Tinggi dapat mengadili banding atas keputusannya sendiri. Kalau Pengadilan Tinggi akan diberi kewenangan untuk mengadili banding atas keputusannya sendiri, pasti proses ini harus dijalankan oleh hakim-hakim yang berbeda dengan hakim-hakim yang mengeluarkan keputusan pertama.

Selain daripada posisi dan peranan Pengadilan Tinggi dalam hirarki yudisial, ada sejumlah persoalan yang telah diidentifikasi oleh JSMP selama tahun 2004 yang menyangkut praktek, prosedur dan pemrosesan banding²⁹. Misalnya, rupanya ada kebingungan tentang cara yang tepat untuk melaksanakan hukuman apabila keputusan yang tersangkut dapat dibanding, pada khususnya apakah pemohon yang naik banding atas hukuman penjara seharusnya tetap bebas sambil menunggu pemrosesan

²⁴ Informasi ini diperoleh melalui wawancara antara staf JSMP dan panitera di Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 20 Juli 2004.

²⁵ Masing-masing Bagian 164.2 dan Bagian 110.

²⁶ Hanya warga negara Timor Leste diizinkan untuk menjadi hakim Mahkamah Agung berdasarkan Bagian 127.1 Konstitusi.

²⁷ Kriteria ini diatur dalam Bagian 29 dari *Undang-Undang Kehakiman*.

²⁸ *Armando dos Santos; Paulino de Jesus*.

²⁹ Lihat informasi umum dalam Laporan, *Tinjauan tentang Yurisprudensi Pengadilan Tinggi selama tahun pertama operasi sejak Kemerdekaan Timor Leste*, Agustus 2004.

bandingnya³⁰. Juga ada persoalan yang timbul berkaitan dengan penerapan dan analisa Pengadilan Tinggi terhadap undang-undang. JSMP telah mengamati bahwa dalam sidang yang dijalankan dan pertimbangan hukum yang diterapkan, kadang-kadang Pengadilan Tinggi gagal untuk membahas setiap alasan yang mendasari suatu banding, dan yang dibahas dan ditetapkan kembali justru adalah persoalan hukum yang *tidak* dibanding. Pola lain yang menonjol adalah penundaan yang berlebihan untuk mengadili banding sela yang menyangkut penahanan pra-sidang. Untuk periode Juli 2003-Juni 2004 Pengadilan Tinggi memerlukan rata-rata 87 hari untuk memutuskan banding sela atas perintah penahanan pra-sidang, yaitu periode waktu yang jauh lebih lama daripada yang dapat dianggap tepat menurut regulasi-regulasi UNTAET. Walaupun demikian, JSMP memuji Pengadilan Tinggi karena mencapai kemajuan yang signifikan untuk mengurangi penundaan tersebut, dari 104 hari selama enam bulan kedua tahun 2003 untuk menjadi 54 hari pada enam bulan pertama pada tahun 2004.

Tanpa melupakan kekurangan tersebut di atas, serta mengingat bahwa sistem peradilan di Timor Leste masih dalam tahap paling awal, maka harus ditegaskan bahwa menurut JSMP, kenyataan bahwa Pengadilan telah mengkonsolidasikan operasinya dan meningkatkan pengelolaan kasusnya dengan sendirinya merupakan kemajuan yang signifikan. Ringkasan ini yang menguraikan hasil temuan JSMP mengenai operasinya Pengadilan Tinggi pada tahun 2004 disampaikan dengan tujuan untuk membantu melanjutkan kemajuan tersebut.

6. Evaluasi Terhadap Aktor Aktor Peradilan

Perkembangan yang signifikan dicapai untuk memulai sebuah sistem untuk menjamin posisi aktor pengadilan di tahun 2004. Proses evaluasi terhadap karier hakim, penuntut dan pembela umum dimulai tahun ini. Sistem peradilan di Timor Leste telah mengalami kemajuan; akan tetapi masih ada masalah-masalah lain yang dihadapi. Ringkasan ini dibuat berdasarkan pemantauan JSMP terhadap proses system judicial dalam hal Evaluasi dan Pelatihan yang dilakukan pada tahun 2004. Dalam undang-undang dekret No 1/2002³¹ mengatakan bahwa ketika perundang-perundangan yang relevan disyahkan serta setelah dilakukannya evaluasi maka masing-masing aktor peradilan dapat melakukan karier mereka. Dengan dasar hukum itulah semua aktor pengadilan diminta untuk berpartisipasi dalam evaluasi tersebut agar mereka diangkat secara efektif dalam pekerjaan mereka masing-masing.

Ringkasan ini memuat bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan evaluasi terhadap para hakim, Penuntut umum dan Pembela Umum yang menjalani percobaan. Evaluasi dilakukan berdasarkan kualifikasi individu seperti komitmen dan profesionalisme secara umum.

³⁰ Lihat Update Keadilan JSMP No 10/2004, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam kasus Virgilio Smith*, 6 November 2004

³¹ Section 3

6.1 Percobaan Hakim

Saat ini ada sebanyak 23 hakim percobaan yang kesemuanya bekerja untuk menangani kasus-kasus biasa di pengadilan distrik kecuali : tiga diantaranya bekerja di Panel Khusus Kejahatan Berat dan satu di Pengadilan Tinggi. Kebanyakan Hakim yang dinominasikan sebagai hakim percobaan oleh Administrator Transisi selama zaman UNTAET. Hakim pertama kali dinominasikan pada bulan Januari tahun 2000. Evaluasi untuk posisi permanen baru dimulai tahun ini setelah empat tahun menjalani percobaan.

Pada bulan Februari 2004, aturan-aturan Evaluasi bagi para Hakim untuk mendapatkan karier judicial yang disahkan oleh disahkan. sesuai dengan Aturan-aturan ini, evaluasi terhadap para hakim akan melalui dua bagian utama yaitu: tes tertulis dan evaluasi terhadap prestasi yang dicapai selama masa percobaan³². Test tertulis dilakukan oleh sebagian besar para hakim yang menjalani percobaan pada bulan September 2004.

Hasil ujian belum dikeluarkan kepada peserta. Selain dari itu, belum diketahui evaluasi terhadap prestasi jaksa selama periode percobaan. JSMP memahami bahwa ada banyak perkembangan yang terjadi dalam sektor judicial pada saat ini akan tetapi diperlu diselesaikan dengan tepat waktu. Pertimbangan juga harus diberikan kepada para jaksa selama periode percobaan karena mayoritas pekerjaan yang dilakukan sekarang dilakukan di zaman Indonesia dan sekarang evlausi dilakukan oleh komite yang yang tidak memiliki keterampilan berbahasa Indonesia dan Tetum.

6.2 Percobaan penuntut Umum dan Pembela Umum

Jaksa Penuntut umum pada saat ini sebanyak 15 orang. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa hanya kira-kira 2/3 jaksa penuntut umum yang kurang lebih memiliki tiga tahun pengalaman yang perlu dievaluasi untuk posisi permanent. Selain dari itu, sekitar 9 Pembela Umum yang memenuhi syarat akan mengikuti asesmen. Peraturan Pemerintah 9/2004 dan 8/2004, Aturan-aturan hukum untuk evaluasi jaksa penuntut dan pembela umum yang menjalani percobaan, diatur dalam prosedur evaluasi terhadap aktor pengadilan.

Dalam undang-undang dikatakan bahwa evaluasi terhadap aktor pengadilan yang masih dalam tahap percobaan meliputi evaluasi tertulis (70%) dan evaluasi prestasi selama masa percobaan (30%). Tes tertulis dilakukan pada tanggal 10 Desember 04. bentuk soal tes adalah pilihan ganda dan hasil tes tersebut dapat diperiksa selama lima hari, sehingga tahap ini diselesaikan pada bulan Januari 2004.

Pengangkatan aktor pengadilan permanen merupakan perkembangan yang disambut baik dan akan berdampak pada fungsi dan hubungan antara hakim internasional/posisi mentor dalam pengadilan di tahun mendatang. Sementara diharapkan bahwa hasilnya akan diumumkan pada awal tahun baru untuk dapat membantu perencanaan dan efisiensi dalam system peradilan. Yang terpenting dari evaluasi terhadap individu aktor pengadilan yang telah bekerja keras dalam pembentukan system peradilan di Timor Leste sejak tiga

³² Lihat pada pasal 1 Aturan-aturan evaluasi.

tahun yang lalu harus diakui. Menjamin sebuah system yang adil, transparan dan dapat ditinjau adalah penting bagi integritas dan reputasi dari system judicial untuk waktu yang lama.

Hasil dari evaluasi bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap Panel Khusus Kejahatan Berat yang mana satu orang Hakim Timor diperlukan dalam panel. Pada saat ini ada tiga orang hakim Timor yang bekerja di Panel Khusus dan kemampuan bagi semua panel untuk bekerja akan sangat tergantung pada kesuksesan hasil evaluasi bagi hakim Timor, bagi setiap hakim yang diminta untuk mengikuti pelatihan akademik terlebih dahulu mereka harus mengikuti ujian tertulis sebelum masuk pelatihan dan apabila sudah dinyatakan lulus.

7. Program Pelatihan Baru

Tahun ini adalah pelatihan khusus baru di Pusat pelatihan judicial untuk persiapan bagi semua aktor-aktor pengadilan serta para sarjana hukum. JSMP senang dengan rencana pelatihan yang baru yang terkordinasi dan komprehensif. Program ini didirikan oleh Dewan Kordinasi untuk perkembangan sistem judicial (anggota dewan ini adalah: Menteri kehakiman, Kepala Pengadilan Tinggi, Jaksa Agung) dan dana dari UNDP. Pelatihan ini di mulai bulan Oktober 2004 dan berakhir sampai dengan tanggal 26 November 2004. Pelatihan ini diawali dengan kursus bahasa Porto selama satu bulan yaitu bulan September.

Pada bulan februari 2004 Majelis Tinggi Kehakiman mengeluarkan sebuah direktif tentang penggunaan bahasa resmi di pengadilan. Direktif itu memberikan kesempatan selama kurang lebih tujuh bulan untuk mengimplementasi bahasa resmi –tetun dan portugés- dalam semua dokumen di pengadilan. Implisit derektif itu melarang penggunaan bahasa indonesia di pengadilan. Mengingat dampak implementasinya dan tanggapan para aktor pengadilan dalam kondisi ketika direktif itu diberlakukan, JSMP telah membuat sebuah laporan khusus untuk membahas dampak implementasi direktif tersebut. Secara prinsip JSMP tidak mempersoalkan legalitas bahasa resmi, tetapi JSMP berpendapat bahwa dampak implementasinya di pengadilan mengingat kebanyakan aktor pengadilan belum terbiasa menggunakan kedua bahasa itu di penngadilan, terlebih dalam penulisan dokumen. Saat ini JSMP mengamati bahwa terjadi perubahan penggunaan bahasa di pengadilan dari bahasa kerja menjadi bahasa resmi. Apabila dalam persidangan dipimpin oleh hakim internasional biasanya menggunakan dua bahasa (tetun dan portugis) terkecuali kalau semua aktor persidangan adalah orang Timor Leste. Persidangan oleh hakim internasional saat ini disediakan penerjemah biasanya dalam bahasa portugis ke tetun dan khususnya sidang yang dipimpin oleh hakim internasional. Meskipun demikian, saat ini sepertinya tidak ada penerjemah khusus di pengadilan distrik yang bekerja secara permanen di pengadilan untuk membantu hakim-hakim nasional, baik di persidangan maupun di luar persidangan (penerjemahan dokumen dan urusan administrasi lain).

Selesai dengan kursus bahasa Portugis, dilanjutkan dengan materi pelatihan, Pelatihan ini merupakan yang pertama kali lengkap, lama, dan terkoordinasi dengan semua aktor. Hari

pertama dalam pelatihan tersebut mengenai kode etik. dan selanjutnya materi yang di bahas lagi antara lain mengenai: pemeriksaan barang bukti, perbedaan antara hukum acara pidana dan perdata, interpretasi hukum, peraturan hukum, hukum acara perdata, hukum acara pidana, prosedur investigasi, hukuman dalam kasus pidana dan perdata, kejahatan publik, bukti yang dibutuhkan, hukuman tuduhan, namun materi tersebut tidak di mengerti oleh para peserta. Pada awalnya ada penerjemahan dalam bahasa tetum tetapi setelah beberapa minggu tidak ada penerjemahan lagi. Banyak peserta pelatihan yang mengalami hambatan karena para pengajar menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh peserta, yaitu menggunakan bahasa Portugis, walaupun diantara para peserta ada yang mengerti bahwa materi yang diberikan oleh pengajar sangat bagus namun kendala yang dihadapi adalah menyangkut masalah bahasa. Di segi lain juga para pengajar memberikan pekerjaan rumah kepada peserta pelatihan untuk mengerjakannya.

Di sisi lain beberapa peserta juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerti materi, para peserta telah menulis surat yang ditujukan kepada Dewan Koordinasi dana yaitu UNDP, untuk membatu peserta agar memahami materi dengan menyediakan seorang juru bahasa, namun pihak UNDP merespon bahwa tidak mempersiapkan seorang juru bahasa tetapi UNDP akan berusaha dengan memberikan Kamus Portugis, dan ini berarti sama saja para peserta tetap tidak akan mengerti apa yang di berikan oleh pengajar.

Namun keterangan seperti ini akan tetap dihaadapi dalam implementasinya an akan menghadapi berbagai persoalan, akan tetapi JSMP tidak bermaksud mengkritik keseluruhan dan sebaliknya JSMP menyambut baik pelatihan ini walaupun waktu yang dibutuhkan untuk memberi pelatihan sangat singkat .

Ujian terjadi pada tgl 28-08-04, soal ujian digunakan hanya dalam bahasa Portu, soal ujian barangkali di mengerti oleh peserta karena soal ujian tersebut menggunakan metode pertanyaan *benar atau salah*. Dan hasil ujian sebenarnya sudah harus diumumkan pada tgl 6-12-04 namun sampai sekarang belum ada informasi mengenai hasil training itu.

Menurut perundang-undangan 30/ 2004, setiap orang yang lulus ujian pada bulan December akan diberitahu bila dipilih untuk menduduki posisi sebagai hakim (dalam pengadilan apa saja) jaksa, atau pengacara umum. Status pada masa depan tidak tergantung pengalaman sebelumnya tetapi hanya berdasarkan hasil ujian December dan menyelesaikan pelatihan secara internsif. Pelatihan internsif mennyangkut dua langkah: akademik (satu tahun) dan pelatihan (enam bulan). Setelah ini, seorang internsif akan bekerja dalam pengadilan tertentu untuk masa satu tahun percobaan. Tugasnya akan ditinjau lagi setelah enam bulan.

Pada bulan Juni ini 8 hakim kembali dari Portugal setelah perlatihan satu tahun. JSMP tidak memahami kalau ada evalusai atau hasilan dari perlatihan ini tetapi karena program perlatihan baru tersebut mulai tahun yang akan datang mungkin hakim-hakim yang lain tidak mengikuti perlatihan dalam Portugal pada masa depan dekat.

8. Berakhirnya UNMISSET

Sudah pasti bahwa Misi PBB untuk Mendukung Timor Leste akan berakhir pada bulan Mei 2005. Pencabutan ini akan mempengaruhi sejumlah sektor pemerintahan di Timor Leste, terutama sektor peradilan. Pada saat ini 7 kelompok kerja UNMISSET telah dibentuk di bidang tersebut untuk membahas persoalan-persoalan dan merencanakan pencabutan tersebut.

Dampak pada sektor peradilan akan mempengaruhi yurisdiksi Kejahatan Berat maupun kejahatan biasa. Pada saat ini cukup banyak personil internasional yang didanai oleh UNMISSET bertindak di kedua yurisdiksi tersebut, dan sampai saat ini tidak jelas berapa dari orang-orang tersebut akan didanai melalui mekanisme lain setelah 2005.

8.1 Proses Kejahatan Berat

Tetap ada spekulasi tentang proses Kejahatan Berat di Timor Leste. Persoalan tentang masa depan proses Kejahatan Berat dipertimbangkan pada tahun 2004³³ tetapi sampai sekarang pemerintah belum mengumumkan pendapatnya mengenai hal ini. Tanpa mengetahui apakah proses ini akan berlanjut setelah pencabutan UNMISSET, dan tanpa mengetahui bentuknya, maka sulit untuk memperkirakan jumlah personil internasional dan materi yang akan diperlukan di kemudian hari, yang mana pada saat ini disediakan oleh UNMISSET.

Proses kejahatan berat, yang terdiri dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, Kantor Jaksa dan Kantor Pembela Umum untuk kejahatan berat. Keja, sebagian besar terdiri dari staf internasional yang didanai oleh UNMISSET. Sangat penting agar pemerintah Timor Leste mempertimbangkan opsi-opsi untuk menangani kejahatan berat setelah Mei 2005 karena kemungkinan besar bahwa opsi-opsi yang tersedia pada umumnya akan memerlukan perubahan personil internasional dan perubahan dalam perundang-undangan. Perencanaan tersebut harus dilakukan sebelum tanggal 20 Mei 2005 untuk menjamin peralihan yang lancar.³⁴

Sampai sekarang belum ada konfirmasi tentang pembentukan Komisi Ahli yang disetujui oleh PBB untuk menginvestigasi proses yang berjalan di Indonesia dan di Timor Leste berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan pada tahun 1999. Diharapkan bahwa Sekretaris Jendral PBB akan membuat pengumuman setelah Pemilu Indonesia pada bulan Oktober, tetapi sampai tanggal 15 Desember 2004 belum ada pengumuman.

8.2 Pengadilan Kejahatan Biasa

8.2.1 Pengadilan Distrik

Selama tahun ini perubahan radikal terjadi berkaitan dengan keikutsertaan para aktor pengadilan nasional dalam sebuah program latihan (lihat bagian tentang program latihan

³³ Untuk diskusi tentang beberapa opsi, lihat laporan JSMP tentang Konferensi JSMP

³⁴ Lihat laporan JSMP Konferensi Masa depan kejahatan berat, 23-24 September 2004.

dan administrasi pengadilan). Program latihan ini mengakibatkan kekurangan aktor pengadilan di pengadilan-pengadilan, dan ada keperluan untuk menunjuk aktor pengadilan internasional. 4 hakim internasional untuk Pengadilan Distrik, 4 panitera internasional, 2 Jaksa Penuntut Umum internasional dan satu pembela umum didanai oleh UNMISSET untuk bekerja di yurisdiksi kejahatan biasa. Penunjukan ini dilakukan pada bagian kedua dari tahun 2004 (kira-kira bulan Oktober) dan belum diketahui bagaimana orang-orang ini akan didanai setelah bulan Mei 2005. Jumlah aktor internasional yang akan diperlukan setelah UNMISSET berakhir juga tidak jelas karena belum diketahui berapa aktor pengadilan nasional yang akan ditunjuk setelah evaluasinya selesai (lihat bagian tentang evaluasi aktor pengadilan). Perencanaan pada saat ini untuk aktor pengadilan internasional termasuk memperkerjakan mereka di pengadilan-pengadilan setelah bulan Mei 2005 dan mentoring untuk aktor nasional. Peranan mentoring berarti mereka akan diperlukan setelah Mei 2005 tanpa melihat jumlah aktor pengadilan nasional yang kembali ke pengadilan-pengadilan setelah lulus evaluasinya.

8.2.2 Pengadilan Tinggi

Pada saat ini Regulasi-Regulasi³⁵ mengatur bahwa hakim-hakim Pengadilan Tinggi harus termasuk hakim nasional dan hakim internasional. Pada saat ini semua hakim internasional yang ditugaskan untuk bekerja di Pengadilan Tinggi (3) didanai oleh UNMISSET. Sebelum hasil evaluasi bagi para hakim diketahui, tidak mungkin untuk menilai apakah ada hakim dalam jumlah yang memadai untuk menjalankan peranan tersebut, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tinggi di kemudian hari mungkin harus mengadili Kejahatan Berat dan bahwa hanya satu hakim nasional mempunyai pengalaman sebagai aktor di pengadilan tersebut, pasti persoalan kapasitas akan timbul.

Yang juga memprihatinkan adalah kenyataan bahwa salah satu hakim internasional yang didanai melalui program UNMISSET melakukan sejumlah fungsi utama termasuk: Ketua Pengadilan Tinggi, Anggota Dewan Manajemen untuk Pusat Latihan Yudisial, Ketua Dewan Tinggi Pengadilan, Anggota Dewan yang mengkoordinasikan program penguatan sektor peradilan.³⁶ Ada ketergantungan pada UNMISSET untuk mendanai hakim internasional ini yang menjalankan begitu banyak fungsi utama, dan hal ini perlu diperhatikan secepatnya.

Kalau sumber dana yang lain untuk posisi-posisi tersebut tidak diidentifikasi, maka perubahan terhadap perundang-undangan akan diperlukan agar pengadilan dapat berfungsi dan sumber daya manusia untuk staf nasional juga akan menimbulkan kesulitan.

³⁵ Bagian 15.4 dari Regulasi 2000/11, sebagaimana diamendemen oleh 2001/ 25.

³⁶ Peranan lain termasuk pelatih di Pusat Latihan Yudisial, Ketua komite yang akan mengevaluasi Jaksa Nasional sebelum diangkat sebagai anggota Kantor Kejaksaan, Ketua komite yang akan mengevaluasi Pembela Umum Nasional sebelum diangkat sebagai anggota Kantor Pembela Umum.

Selain itu, ada kemungkinan juga bahwa semua banding dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat tidak akan diselesaikan sebelum Mei 2005³⁷ dan kasus tersebut akan tetap diadili. Persoalan ini harus dipertimbangkan dengan mengingat kenyataan bahwa mungkin posisi untuk jaksa internasional dan pembela umum dari proses Kejahatan Berat tidak akan dilanjutkan setelah Mei 2005.

Proses yang telah dimulai ini memerlukan jumlah aktor pengadilan yang signifikan untuk melaksanakan fungsi-fungsi judicial, memberikan arahan dan pelatihan. Program ini tidak akan bermanfaat tanpa ada dana dan perencanaan terhadap posisi ini untuk paling tidak dua tahun.

³⁷ Melihat bagian tentang di atas tentang SPSC.